



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN
PENANGKAPAN DAN PENAHANAN
(STUDI DI POLDA JATENG)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Menyelesaikan Pendidikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun Oleh :

FARID MUHAMMAD HANANTYO
NPM. 201003742018335

SEMARANG
2024



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN
PENANGKAPAN DAN PENAHANAN
(STUDI DI POLDA JATENG)

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
FARID MUHAMMAD HANANTYO
201003742018335

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

Bambang Teguh Handoyo, S.H., M.Hum.
NIDN : 0606036501

Anggota,

Maridjo, S.H., M.H.
NIDN : 0611056001

Anggota,

Widiati Dwi Winarni, S.H., M.H.
NIDN : 0606066205

Mengetahui
Dekan,



Prof. Dr. Teguh Handoyo, S.H., M.Hum.
NIDN : 0606036501

SEMARANG
TAHUN 2024

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah	5
C. Perumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian.....	6
F. Kegunaan Penelitian	6
G.Sistematika Uraian Skripsi	6
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Pengertian Hukum Pidana dan Tindak Pidana	8
B. Tahapan Penanganan Perkara Pidana Menurut KUHP	17
C. Pengertian Penangkapan dan Penahanan	22

	D. Pengertian Ganti Rugi Menurut KUHAP	29
	E. Pra Peradilan Dalam Perkara Pidana	35
BAB III	: METODE PENELITIAN	39
	A. Tipe Penelitian	39
	B. Spesifikasi Penelitian	39
	C. Sumber Data	40
	D. Metode Pengumpulan Data	40
	E. Metode Penyajian Data	41
	F. Metode Analisis Data	41
BAB IV	: HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA	42
	A. Pelaksanaan Penangkapan dan Penahanan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Di Polda Jateng	42
	B. Upaya yang Dapat dilakukan Tersangka terhadap Penangkapan Dan Penahanan Yang tidak Sah oleh Penyidik Polri	61
BAB V	: PENUTUP	70
	A. Kesimpulan	70
	B. Saran-Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72

ABSTRAK

Lahirnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diharapkan akan menjadi pedoman kepada para penegak Hukum dalam menjalankan profesinya secara professional dengan menghormati Hak Asasi Manusia ternyata belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dengan banyaknya permasalahan yang terjadi didalam kehidupan masyarakat diantaranya yaitu karena terjadinya penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum terhadap seseorang yang akhirnya ternyata tidak terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Bahkan lebih dari itu, mereka yang tidak bersalah ternyata telah mengalami penyiksaan dan penderitaan lainnya, yang melampaui batas-batas perikemanusiaan didalam tahanan. Hal yang demikian tentunya terhadap orang yang dijadikan sebagai tersangka/terdakwa merasa sangat dirugikan, oleh karena itu sangatlah perlu untuk mendapatkan suatu ganti kerugian atas segala kerugian yang timbul sebagai akibat dari tindakan tersebut baik berupa kerugian nyata (riil), biaya yang telah dikeluarkan selama yang bersangkutan ditangka/ditahan, maupun kerugian immateriil berupa rusaknya nama baik yang dilihat menurut kedudukannya masing-masing. Berdasarkan diuraikan diatas, maka dalam skripsi ini perumusan masalah adalah sebagai berikut : Bagaimana Pelaksanaan Penangkapan Dan Penahanan Dalam Penyidikan Di Polres Banjarnegara? Serta upaya-upaya apakah yang dapat dilakukan Tersangka apabila terjadi penangkapan dan Penahanan Yang Tidak Sah?

Dari keseluruhan penulisan ini, penulis menggunakan metodologi penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis normative, karena permasalahan yang diteliti adalah berkisar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penerapannya dalam praktek. Berhubung dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative, maka sumber data yang dipergunakan adalah sumber data sekunder (studi pustaka) yang didukung oleh sumber data primer, dimana penulis telah mengadakan wawancara dengan Penyidik POLDA Jateng . Selanjutnya data yang telah diperoleh dianalisa secara kualitatif, sehingga tersusunlah skripsi ini.

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa sebelum melaksanakan Penangkapan dan Penahanan dalam penyidikan di Polda Jateng telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangungan ,melalui beberapa tahapan yaitu penyidik telah melakukan penyelidikan yang teliti dan hati-hati berdasarkan rambu-rambu yang diberikan kepada penyidik maupun penyidik. Terhadap adanya penangkapan dan penahanan yang tidak sah oleh penyidik Polri, tersangka dapat melakukan upaya-upaya yaitu dengan mengajukan ganti rugi dan rehabilitasi dengan mengajukan gugatan pra peradilan sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 77 KUHAP.